KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

MANUAL IKU 2024

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dukungan kerjasama dari semua pihak terkait lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, sehingga Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai bentuk upaya dalam mendukung Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, maka BPBL Ambon sebagai salah satu UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya perlu melakukan pengukuran data kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja terhadap program/kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman mengenai Pengukuran Indikator Kinerja Utama yang terkait dengan informasi Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya seperti yang tertuang dalam Penetapan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama tahun 2024.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga akan diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Ambon, 03 Januari 2024

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON
PERIKANAN BUDIDAYA
REPUBLIK INDONESIA

Sarwono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
GLOSSARY ..... **iv**

I. PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan 1
1.3. Sasaran 2
1.4. Ruang Lingkup 2

II. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA **3**
2.1 Standar Operational Prosedur Pengukuran Data Kinerja 3
2.2 Koreksi Data Indikator Kinerja 4
2.3 Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja 5
2.4 Pelaporan Data Kinerja 5

III. MATRIKS KINERJA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON **6**
3.1. Matriks Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon 6

IV. INFORMASI MANUAL IKU BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON **8**
4.1. Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah) 8
4.2. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen) 9
4.3. Persentase bantuan sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang disalurkan (%) 10
4.4. Persentase bantuan calon induk yang disalurkan (%) 11
4.5. Persentase Bantuan Benih yang disalurkan (Persen) 11
4.6. Persentase calon induk ikan laut yang diproduksi (%) 12
4.7. Persentase Diseminasi Teknologi Budiddaya ikan (%) 13
4.8. Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen) (%) 14
4.9. Persentase bantuan benih ikan hias laut yang disalurkan (%) 15
4.10. Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit) 16
4.11. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen) 16
4.12. Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen) 17
4.13. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BPBL Ambon (Indeks) 18
4.14. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) 20
4.15. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (%) 21
4.16. Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai) 22
4.17. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (%) 23
4.18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai) 24
4.19. Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai) 26
4.20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (%) 27
4.21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (%) 28
4.22. Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (%) 29
4.23. Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai) 30

4.24. Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks) 31
4.25. Persentase pelaku usaha perikanan Budi Daya yang terintegrasi KUSUKA (%) 33

V. PENUTUP 34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja BPBL Ambon 3
Tabel 2. Matriks Indikator Kinerja BPBL Ambon Tahun 2024 6

GLOSSARY

1. ***Pemantauan*** adalah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan apakah input atau sumber daya yang tersedia telah optimal dimanfaatkan dan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah menghasilkan *output, outcome*, *benefit*, dan *impact* yang diharapkan.
2. ***Evaluasi*** adalah kegiatan untuk menilai efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan dengan menggunakan indikator-indikator tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara sistematik dan obyektif serta terdiri dari evaluasi sebelum kegiatan dimulai, saat kegiatan berlangsung, dan sesudah kegiatan selesai.
3. **Indikator** adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
4. **Kinerja** : suatu hasil pada sebuah fungsi pekerjaan atau aktivitas selama periode tertentu untuk mencapai tujuan organisasi
5. ***Indikator kinerja*** adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan dicapai.
6. ***Pengukuran Kinerja*** adalah suatu metode untuk menilai dan mengukur tingkat kemajuan kinerja instansi/unit kerja dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja.
7. ***Pengukuran data kinerja*** adalah kegiatan pengukuran data dan capaian kinerja unit kerja lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya.
8. ***Pelaporan data kinerja*** adalah salah satu bentuk media penyampaian informasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program dan atau kegiatan dan tingkat keberhasilannya suatu pembangunan.
9. ***Perspektif Stakeholder*** : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada bagaimana organisasi memehuni harapan *stakeholder*
10. ***Perspektif Customer*** : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada kepuasan *customer* (pengguna layanan)
11. ***Perspektif Internal Process*** : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada proses bisnis utama di dalam organisasi untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada *stakeholder* dan *customer*
12. ***Perspektif Learn and Growth*** : Sudut pandang organisasi yang berfokus pada sumber daya internal organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan internal
13. ***Sasaran Strategis*** yang selanjutnya disingkat SS : Sasaran jangka panjang yang langsung berasal dari pernyataan misi organisasi
14. ***Peta Strategi*** : Suatu *dashboard* yang memetakan SS organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisas
15. ***Rencana Aksi*** yang selanjutnya disingkat RA : satu atau beberapa langkah kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target indikator kinerja sehingga berimplikasi pada pencapaian SS
16. ***Cascading*** : proses penjabaran dan penyelarasan SS, indikator kinerja, dan target indikator kinerja ke level unit organisasi yang lebih rendah
17. ***Kontrak Kinerja*** : Dokumen kesepakatan antara atasan langsung dengan bawahan tentang terget kinerja dalam periode 1 (satu) tahun

18. ***Penghitungan Maximize*** :Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu indikator kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.
19. ***Penghitungan Minimize*** :Iindikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu Indikator Kinerja yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik. Rumus capaian untuk indikator kinerja minimize adalah: (1+(1-realisasi/target)) x 100%
20. ***Penghitungan Stabilize*** : Indikator kinerja yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu indikator kinerja yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.
21. ***Lag Outcome*** **:** pencapaian kinerja yang dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat *outcome* (hasil dari keluaran)
22. ***Lag Output*** **:** pencapaian kinerja yang dipengaruhi pihak eksternal dan jenis IKU-nya bersifat output (keluaran)
23. ***Lead Input*** **:** pencapaian kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya sendiri dan jenis IKU-nya bersifat input
24. ***Lead Process*** **:** pencapaian kinerja yang sepenuhnya berada di bawah kendali unit kerjanya sendiri dan jenis IKU-nya bersifat proses
25. ***Adopsi Langsung*** **:** Langsung menurunkan Sasaran Strategi, KPI dan Target dari atasan
26. ***Lingkup Dipersempit*** **:** Mempersempit lingkup sesuai dengan bidang masing-masing
27. ***Komponen Pembentuk*** **:** Memisahkan Sasaran Strategi atau KPI berdasarkan komponen pembentuk pada masing-masing bagian
28. ***Buat baru*** **:** Membuat Sasaran Strategi, KPI dan Target yang baru
29. **Akumulasi :** IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian IKU bawahannya
30. **Kontribusi :** IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung berdasarkan kontribusi pencapaian IKU dari bawahannya (biasanya untuk komponen pembentuk)
31. **Rata-rata :** IKU lingkup dipersempit dan pencapaiannya dihitung dari capaian rata-rata pencapaian IKU bawahannya
32. **Sama Persis :** IKU yang mempunyai metode adopsi langsung
33. **Jenjang pengelola :** merupakan penanggungjawab dalam melakukan pengelolaan (pelaksanaan dan pengukuran) terhadap capaian IKU (pengelola adalah unit kerja setingkat eselon III)

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai dukungan atas program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan tahun 2024, terdapat 4 sasaran kegiatan dengan 25 indikator kinerja yang telah ditetapkan guna mencapai target kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Salah satu upaya mendukung prioritas pembangunan 2020-2024 diperlukan adanya reformasi birokrasi. Untuk proses inilah, maka BPBL Ambon melakukan fokus pembenahan manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP meliputi (i) rencana strategis; (ii) perjanjian kinerja; (iii) pengukuran kinerja; (iv) pengelolaan data kinerja; dan (v) pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja menjadi hal penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi. Agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, diperlukan suatu Pedoman Pengukuran Data Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tahun 2024.

1.2. Tujuan

Penyusunan Pedoman Umum Pengukuran Data Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan pengukuran kinerja di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, dengan tujuan :

a. Penilaian (Evaluasi) Kinerja

   Yaitu untuk mengevaluasi sejauhmana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

b. Pengendalian Kinerja

   Yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan.

c. Peningkatan Kinerja

   Yaitu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan

dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini adalah :

- Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan dan penyajian data;
- Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan;
- Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan;
- Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 meliputi : (i) Pendahuluan; (ii) Metodologi Pengukuran Data Kinerja; (iii) Peta Strategis BPBL Ambon; (iii) Matriks Indikator Kinerja BPBL Ambon; (iv) SOP Pengukuran Indikator Kinerja; (v) Informasi Manual Indikator Kinerja BPBL Ambon; dan (vi) Lampiran.

BAB II. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1. Standar Operational Procedur (SOP) Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	Nomor SOP	: SOP 008-010
	Tanggal Pembuatan	: 06 Nopember 2023
	Tanggal Revisi	: 03 Januari 2024
	Tanggal Efektif	: 03 Januari 2024
	Disahkan oleh	Kepala Balai Sarwono 198308152005021001
	Nama SOP	: PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);		1. S1, D3
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);		2. Memahami Kebijakan mengenai Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);		
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);		
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688);		
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 967);		
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016);		
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
		1. ATK
		2. Komputer
		3. SK Pengelola Manajemen
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
Data maksimal terkumpul pada tim kinerja pada tanggal 10 bulan triwulan berikutnya		Buku Kontrol Dokumen

Tabel 1. Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana							Ket
		Kasubbag Umum	Ka Balai	Tim Pengelola manajemen	Staf Pelaksana	Kelengkapan	Waktu / menit	Output	
1	Kasubbag Umum melaporkan rencana Pengukuran Indikator Kinerja					Rencana kerja, TOR	30	Kesedian dan arahan	
2	Ka Balai menelaah kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja dan memberikan arahan serta memerintahkan Kasubbag Umum untuk membuat usulan Tim Pengelola Manajemen Kinerja					Rencana kerja, TOR	30	Disposisi	
3	Kasubbag Umum mengusulkan Tim Pengelola Manajemen Kinerja ke Ka Balai					Disposisi, draft SK	1080	Disposisi, SK	
4	Ka Balai Mengesahkan SK Tim Pengelola Manajemen Kinerja					Disposisi, SK	60	Disposisi, SK	
5	Tim Pengelola manajemen melakukan Pengukuran Indikator Kinerja Balai					Rencana kerja, TOR, Disposisi	360	konsep hsl pengukuran	
6	Tim Pengelola Manajemen menyerahkan draft hasil Pengukuran Indikator Kinerja kepada Ka Balai	tidak				Konsep hasil pengukuran	60	konsep hsl pengukuran	
7	Memeriksa kelengkapan dan substasi draft hasil Pengukuran Indikator Kinerja. Jika menyetujui memberikan paraf dan menyerahkan ke Kasubbag Umum. Jika tidak menyetujui, mengembalikan ke Tim Pengelola Manajemen.			ya		Disposisi, draft kebijakan	30	Disposis, draft kebijakan	
8	Meneruskan laporan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Kasubbag Umum untuk di dokumentasikan					Disposisi, dokumen hasil pengukuran	360	Disposisi, dok. hasil pengukuran	
9	Kasubbag Umum memerintahkan staf untuk mendokumentasikan					Disposisi, dokumen hasil pengukuran	120	Tanda terima, dokumen	
10	Staf Pelaksana mendokumentasikan dan mendistribusikan laporan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja					Agenda, Dokumen hasil pengukuran	120	Tanda terima, dokumentasi	

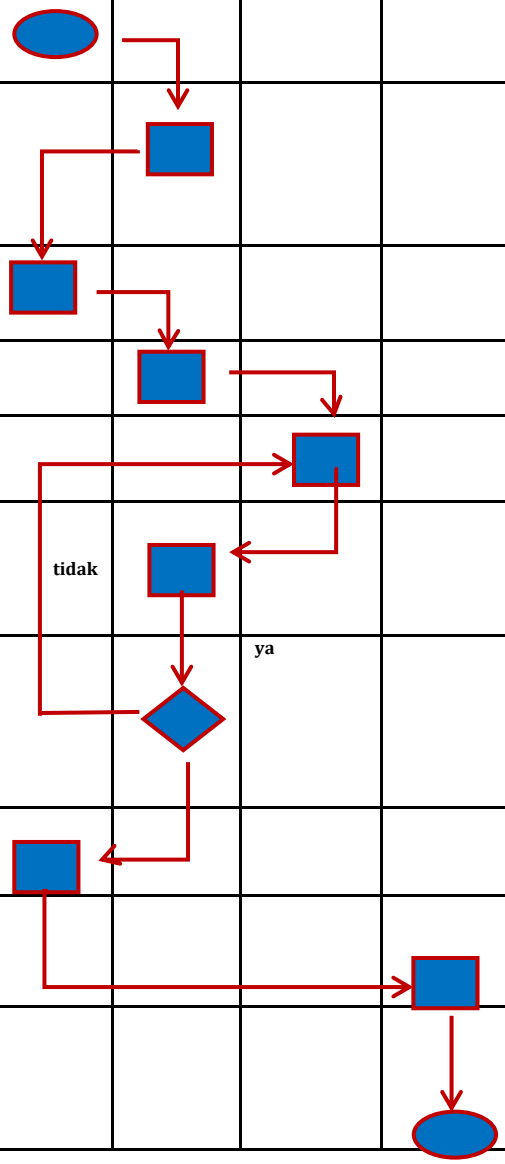

2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang tidak statis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja.

Untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Usulan dilakukan oleh Kepala Seksi/Sub Bagian selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya, disertai dengan data dukung sebagai bukti.
b. Usulan tersebut diajukan kepada Kepala Balai yang kemudian akan diteruskan secara berjenjang kepada Tim Pengukuran Data Kinerja untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi danvalidasi.
c. Apabila usulan koreksi disetujui, Tim Pengukuran Data Kinerja akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala Balai untuk dilakukan pengesahan.
d. Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Balai selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.
e. Untuk data capaian kinerja antara pada periode triwulanan (triwulan I, triwulan II dan triwulan III), batas waktu usulan koreksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah batas akhir pelaporan per periode triwulan.
f. Untuk periode triwulan IV sebagai pendataan data capaian terakhir, batas waktu usulan koreksi paling lambat 10 hari setelah akhir periode triwulan IV.

2.3. Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja

Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisir dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka pada setiap tingkatan pengukuran data kinerja perlu ditetapkan dalam suatu tim pengukuran kinerja, dengan ketentuan bahwa pembentukan tim dilakukan secara terperinci yang diatur masing-masing unit kerja dengan mengacu pada Pedoman Evaluasi dan Pelaporan serta Pedoman Pengukuran Data Kinerja.

2.4. Pelaporan Data Kinerja

Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing-masing penanggungjawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerjapelaksana kegiatan sampai ke tingkat eselon I. Pelaporan data kinerja harus selaras dengan tingkatan unit organisasi dan diatur dalam Pedoman Evaluasi dan Pelaporan Ditjen Perikanan Budidaya.

BAB III. MATRIKS INDIKATOR KINERJA BPBL AMBON

Matriks indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Matriks Indikator Kinerja BPBL Ambon Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	1.	Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)	968.400.000
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5.	Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		6.	Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)	4090
		7.	Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)	100
		8.	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)	75
		9.	Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		10.	Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)	1
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Kawasan dan Kesehatan Ikan	11.	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)	100
		12.	Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)	100
4.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon	13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	85
		14.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		15.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)	100
		16.	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	82
		17.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)	80
		18.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	86
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		21.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	80
		22.	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)	86
		23.	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)	75
		24.	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)	4
		25.	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Budi Daya yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80

BAB IV. INFORMASI MANUAL BPBL AMBON

Informasi manual indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dijabarkan sebagai berikut :

4.1.	**Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Nilai PNBP Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Rupiah)
4	Deskripsi	:	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumberdaya dan hak yang diperoleh Negara, berdasarkan peraturan perundang–undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP BPBL Ambon diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Nilai PNBP BPBL Ambon berasal dari pendapatan yang dihitung dari pendapatan fungsional dan umum. Nilai penerimaan negara terkait sektor KP dan penerimaan lainnya seperti hasil hasil penjualan komoditas budidaya, pengujian lab, sewa rumah dinas, dan pendapatan lainnya yang diterima BPBL Ambon diluar penerimaan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah no 85 tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan
5	Formulasi Perhitungan	:	Nilai PNBP diukur berdasarkan dari jumlah penerimaan fungsional dan umum yang disetor ke kas negara
6	Satuan Pengukuran	:	Rupiah
7	Jenis Aspek Target	:	Kuantitas/output
8	Tingkat Validasi IKU	:	Lag Outcome
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA PRODUKSI
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Adopsi Langsung
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Triwulanan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
742.672.688	888.950.625	940.903.877	1.057.818.530	968.400.000

4.2.	**Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)**		
1	Perspektive	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3	Nama IKU	:	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)
4	Deskripsi	:	Bantuan bibit rumput laut yang dibantukan kepada masyarakat atau kelompok pembudidaya rumput laut yang bertujuan menyiapkan ketersediaan bibit rumput laut yang berkualitas secara berkesinambungan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan bibit rumput laut tahun anggaran 2024, nomor 380/PER-DJPB/2023. Adapun bentuk bantuan berupa bibit rumput laut dengan spesifikasi : - Strain Kappaphycus alvarezii, Euchema cottoni atau sakul atau Euchema spinosum atau Gracilaria sp - Bibit hasil kultur jaringan atau bibit local sakul yang dihasilkan dan memenuhi kualifikasi sebagai bibit unggul yang dibuktikan dengan surat keterangan asal dan hasil verifikasi oleh UPT DJPB yang memiliki tanggungjawab terkait pengembangan bibit rumput laut. - Kesegaran Thallus tidak berlendir - Thallus bercabang banyak - Warna hijau atau coklat atau jingga - Bersih - Target bantuan pada tahun 2024 sebanyak 7100 Kg.
5	Formulasi Perhitungan	:	$Persentase\ (\%) = \frac{\text{Jumlah bantuan bibit RL yang diterima penerima bantuan}}{\text{Jumlah target bantuan bibit RL BPBL Ambon}} x\ 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persentase
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	*Output Kendali Rendah*
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA PRODUKSI
11	Status Data	:	(i) Data Primer berasal dari hasil penyaluran bantuan dan monev; (ii) Data Sekunder berasal dari laporan produksi dan persediaan yang diolah dan dipublikasikan Sub Koordinator Kelompok Uji Terap Teknik dan Kerjasama
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	Maximize
15	Periode Pelaporan	:	Semester
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
40.000	13.000	-	-	75%

4.3.	**Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)**		
1	Perspektive	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3	Nama IKU	:	Persentase Bantuan Sarana Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL) yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)
4	Deskripsi	:	Bantuan sarana kebun bibit yang dibantukan kepada masyarakat atau kelompok pembudidaya rumput laut yang bertujuan menyiapkan ketersediaan bibit rumput laut yang berkualitas secara berkesinambungan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan kebun bibit rumput laut tahun anggaran 2024, nomor 377/PER-DJPB/2023. Adapun bentuk bantuan berupa sarana kebun bibit rumput laut dengan beberapa metode budidaya yang disesuaikan dengan lokasi calon penerima bantuan. Metode itu antara lain : • Longline • Rakit Apung • Lepas Dasar Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memperoleh target bantuan sarana kebun bibit rumput laut yang harus dicapai sebanyak 46 paket Persentase capaian bantuan KBRL yang diukur berdasarkan jumlah kelompok yang menerima bantuan KBRL dibandingkan dengan jumlah kelompok yang telah disetujui dan perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun berjalan. Target semester pertama adalah 50% dan target semester kedua 75% dan target bantuan pada 2024 sebanyak 38 paket
5	Formulasi Perhitungan	:	$Persentase\ (\%) = \frac{\text{Jumlah bantuan sarana KBRL yang diterima penerima bantuan}}{\text{Jumlah target sarana KBRL BPBL Ambon}} x\ 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persentase
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Ouput Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA PRASARANA DAN SARANA
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Semester
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1	16	26	100%	75%

4.4.	**Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3	Nama IKU	:	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)
4	Deskripsi	:	Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 442 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan pemerintah calon induk ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ikan Tahun Anggaran 2024, BPBL Ambon sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan calon induk ikan kakap putih kepada kelompok pembudidaya ikan dengan rincian sebagai berikut : • Calon Induk Kakap putih berat minimal 300 gram Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memperoleh target bantuan calon induk yang harus dicapai sebanyak 20 ekor. Persentase capaian diukur berdasarkan jumlah kelompok yang menerima bantuan calon induk dibandingkan dengan jumlah kelompok yang telah diverifikasi dan perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun berjalan. Target semester pertama adalah 50% dan target semester kedua 100%
5	Formulasi Perhitungan		$Persentase\ (\%) = \frac{\text{Jumlah bantuan calon induk yang diterima penerima bantuan}}{\text{Jumlah target bantuan calon induk BPBL Ambon}} x\ 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persentase
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Ouput Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA INDUK DAN BENIH
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Semester
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	-	-	150%	75%

4.5.	**Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3	Nama IKU	:	Persentase Bantuan Benih Ikan Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)
4	Deskripsi	:	Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 381 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ikan Tahun Anggaran 2024, BPBL Ambon

			sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan benih kakap putih, Bubara, kerapu, dan ikan hias laut, kepada kelompok penerima bantuan dengan rincian sebagai berikut : • Benih Kerapu ukuran minimal 5 cm • Benih Kakap Putih ukuran minimal 2,5 cm • Benih Bubara ukuran minimal 2,5 cm • Ikan hias laut ukuran minimal 2 cm Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memperoleh target bantuan benih ikan laut yang harus dicapai sebanyak 541.000 Ekor yang terdiri dari 538.000 benih ikan konsumsi laut dan 3.000 benih ikan hias laut. Persentase capaian bantuan benih yang diukur berdasarkan jumlah kelompok yang menerima bantuan benih dibandingkan dengan jumlah kelompok yang telah diverifikasi dan perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun berjalan. Target semester pertama adalah 50% dan target semester kedua 100%
5	Formulasi Perhitungan	:	$Persentase\ (\%) = \frac{\text{Jumlah bantuan benih yang diterima penerima bantuan}}{\text{Jumlah target bantuan benih BPBL Ambon}} x\ 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persentase
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Ouput Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA INDUK DAN BENIH
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Semester
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
1.495.000	1.161.900	1.014.000	118,30%	75%

4.6. Persentase calon induk ikan laut yang diproduksi (%)			
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3	Nama IKU	:	Calon Induk Ikan Laut yang Diproduksi (Ekor)
4	Deskripsi	:	Produksi calon induk ikan laut yang dihasilkan, untuk meremajakan induk induk yang sudah ada, guna meningkatkan kualitas dan kuantitas induk sehingga dapat membantu kenaikan produksi perikanan budidaya. Adapun jenis komoditas yang dikembangkan adalah : • Calon Induk Kakap Putih • Calon Induk Bubara • Calon Induk Kerapu • Calon Induk Ikan Hias Clownfish
5	Formulasi Perhitungan	:	Jumlah calon induk ikan laut yang diproduksi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon setiap periode

6	Satuan Pengukuran	:	Ekor
7	Jenis Aspek Target	:	Kuantitas/output
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA PRODUKSI
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Triwulan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	6843	1928	155,33%	4090

4.7.	**Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3	Nama IKU	:	Persentase Diseminasi Teknologi Budidaya Ikan (Persen)
4	Deskripsi	:	Penyebaran inovasi teknologi perikanan budidaya bidang pembesaran yang disusun dengan metode perencanaan dan disebarkan melalui diskusi atau forum lainnnya yang sengaja diprogramkan, sehingga terdapat kesepahaman dalam implementasi teknologi budidaya perikanan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memperoleh target layanan diseminasi teknologi yang harus dicapai sebanyak 8 Frekuensi. Persentase capaian diukur berdasarkan jumlah diseminasi kegiatan yang disampaikan kepada masyarakat dibandingkan dengan jumlah target kegiatan diseminasi dan perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun berjalan. Target semester pertama adalah 50% dan target semester kedua 100%
5	Formulasi Perhitungan	:	$Persentase\ (\%) = \frac{\text{Jumlah diseminasi kegiatan yang disampaikan}}{\text{Jumlah target kegiatan diseminasi}} x\ 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persen
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas Mutu
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA PRASARANA DAN SARANA
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*

15	Periode Pelaporan	:	Semester
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
0	1	1	100%	100%

4.8.	**Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)**		
1	Perspektive	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3	Nama IKU	:	Persentase Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Air Tawar dan Laut yang Dimanfaatkan (Persen)
4	Deskripsi	:	Bioflok yang disalurkan ke masyarakat dengan kriteria yang tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 386 Tahun 2023 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah sarana dan prasarana budidaya ikan lele dan/atau ikan nila sistem bioflok tahun 2024. Bantuan sarana prasarana budidaya ikan system bioflok yang dibantukan kepada masyarakat atau kelompok pembudidaya ikan yang bertujuan menyiapkan ketersediaan benih ikan air tawar seperti Nila (*Oreochromis niloticus*) dan Lele (*Clarias* sp) yang berkualitas secara berkesinambungan. Adapun jenis bantuan yang diberikan antara lain : • benih ikan • pakan ikan *starter* • Pakan ikan *Grower* dan *finisher* • obat ikan dan vitamin • prasarana dan sarana operasional • peralatan perikanan • pendampingan teknis bioflok. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memperoleh target bantuan bioflok yang harus dicapai sebanyak 48 paket Persentase capaian bantuan bioflok yang diukur berdasarkan jumlah kelompok yang menerima bantuan bioflok dibandingkan dengan jumlah usulan kelompok yang telah disetujui dan perhitungan progress kegiatan dilakukan pada tahun berjalan.
5	Formulasi Perhitungan	:	$Persentase\ (\%) = \frac{\text{Jumlah bantuan sarana budidaya ikan sistem bioflok yang diterima}}{\text{Jumlah target bantuan sarana budidaya ikan sistem bioflok BPBL Ambon}} x\ 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persentase
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas Mutu
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA PRASARANA DAN SARANA
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai Posisi Akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	Maximize

15	Periode Pelaporan	:	Tahunan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
6	12	17	100%	75%

4.9.	**Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3	Nama IKU	:	Persentase Bantuan Benih Ikan Hias Laut yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)
4	Deskripsi	:	Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 381 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya ikan Tahun Anggaran 2024, BPBL Ambon sebagai salah satu unit pelaksana teknis DJPB mendistribusikan bantuan benih kakap putih, Bubara, kerapu, dan ikan hias laut, kepada kelompok penerima bantuan dengan rincian sebagai berikut : • Ikan hias laut ukuran minimal 2 cm Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon memperoleh target bantuan benih ikan laut yang harus dicapai sebanyak 541.000 Ekor yang terdiri dari 538.000 benih ikan konsumsi laut dan 3.000 benih ikan hias laut. Persentase capaian bantuan benih Ikan hias laut yang diukur berdasarkan jumlah kelompok yang menerima bantuan benih dibandingkan dengan jumlah kelompok yang telah diverifikasi dan perhitungan progress kegiatan dilakukan setiap semester tahun berjalan. Target semester pertama adalah 50% dan target semester kedua 100%
5	Formulasi Perhitungan	:	$Persentase\ (\%) = \frac{\text{Jumlah bantuan benih ikan hias yang diterima penerima bantuan}}{\text{Jumlah target bantuan benih ikan hias BPBL Ambon}} x\ 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persentase
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Ouput Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA INDUK DAN BENIH
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Semester
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	-	23.100	106,67%	75%

4.10. Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)			
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan
3	Nama IKU	:	Prasarana Perbenihan yang Direhabilitasi (Unit)
4	Deskripsi	:	Pembangunan unit prasarana pendukung produksi yang dibangun di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melalui suatu kegiatan perencanaan yang baik, jasa konsultasi, pelaksanaan pembangunan, kegiatan pengawasan serta penyusunan BAST kegiatan. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon menargetkan rehabilitasi sarana UPT yang harus dicapai sebanyak 1 Unit
5	Formulasi Perhitungan	:	Kegiatan rehabilitasi UPT yang telah diselesaikan
6	Satuan Pengukuran	:	Unit
7	Jenis Aspek Target	:	Kuantitas/output
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai
10	Sumber Data	:	TIM KERJA INDUK DAN BENIH
11	Status Data	:	Penghitungan hasil raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru (Komponen Pembentuk)
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
0	1	1	1	1

4.11. Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)			
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya kualitas pengendalian kawasan dan kesehatan Ikan
3	Nama IKU	:	Persentase Layanan Pengujian Kesehatan Ikan dan Kualitas Lingkungan (Persen)
4	Deskripsi	:	Jumlah sampel yang diujikan di laboratorium Keskanling yang terdiri dari sampel : 1. Sampel Mikrobiologi 135 sampel 2. Sampel Biologi Molekuler 51 sampel 3. Sampel Kualitas Air berjumlah 615 sampel Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024 memperoleh target pengujian sampel HPI sebanyak 801 Sampel.
5	Formulasi Perhitungan	:	Persentase (%) = $\frac{\text{Jumlah sampel layanan kesehatan ikan yang diuji}}{\text{Target sampel layanan kesehatan ikan}} \times 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persen

7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas Mutu
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Triwulan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
2396	3676	3901	210,32%	100%

4.12.	Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Meningkatnya kualitas pengendalian kawasan dan kesehatan Ikan
3	Nama IKU	:	Persentase Pengujian Sampel Antimikrobial Resistance (AMR) (Persen)
4	Deskripsi	:	Jumlah sampel yang diujikan di laboratorium Keskanling yang terdiri dari sampel AMR. AMR adalah kondisi ketika mikroorganisme seperti bakteri, virus, fungi dan parasit menjadi resisten atau kebal terhadap antimikroba (antibiotik, antivirus, antifungal, antiparasit) yang sebelumnya efektif untuk mencegah atau membunuh mikroorganisme tersebut. Dengan kata lain, antimikroba yang sebelumnya dapat mengatasi infeksi akibat suatu mikroorganisme menjadi tidak efektif atau berkurang efikasinya. Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada tahun 2024 memperoleh target pengujian sampel AMR sebanyak 35 Sampel.
5	Formulasi Perhitungan	:	Persentase (%) = $\frac{\text{Jumlah sampel AMR yang diuji}}{\text{Target sampel AMR}} \times 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persen
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas Mutu
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN
11	Status Data	:	Perhitungan Hasil Raw Data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Triwulan

16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	-	67	152,94%	100%

4.13.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)
4	Deskripsi	:	• Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. • Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). • Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.
5	Formulasi Perhitungan	:	Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, : a. Kualifikasi; b. Kompetensi; c. Kinerja; dan d. Disiplin. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi : a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua); c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda); e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan f. Pendidikan di bawah SLTA.

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan DIII/SM	10
1	Pendidikan DII/DI/SMA	5
0	Pendidikan SMP/SD	1

- Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir, dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	**15**	**-**	**-**
1	Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	15	-	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Pim pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	**-**	**15**	**-**
1	Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak Pernah Ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	**15**	**15**	**22.5**
1	Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22.5
0	Tidak Pernah Ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17.5
1	Pernah Ikut Seminar	10	10	17.5
0	Tidak Pernah Ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	**40**	**40**	**40**

- Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi : a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan b. Perilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d Kebawah	1

- Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi : a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1

- Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
  a. **Kualifikasi** dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
  b. **Kompetensi** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sbb:
     - Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsionak/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya;
     - **Pejabat Struktural** wajib sudah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun dengan total bobot yaitu 40;
     - Pejabat Fungsional wajib sudah melaksanakan Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
     - Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP sejak 1 tahun terakhir dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40;
  c. **Kinerja** diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja Online KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori;
  d. **Disiplin** diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil yang **tidak pernah/pernah** dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG.

- Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
  a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
  b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
  c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
  d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

- Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesonalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut:

IPASN=Nilai Kualifikasi+Nilai Kompetensi+Nilai Kinerja+Nilai Disiplin

IPLev 2=Rerata Nilai IPASN dari seluruh ASN lingkup Level 2

IPLev 1=IPASN Pejabat Lev 1+ *Rerata Nilai IPLev 2*

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Profesional/sangat tinggi
81 – 90	Cenderung profesional/tinggi
71 – 80	Rentan tidak profesional/sedang
61 – 70	Cenderung tidak profesional/
≤60	Sangat tidak profesional/sangat rendah

6	Satuan Pengukuran	:	Indeks nilai
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas Mutu
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Hasil perhitungan raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Lingkup dipersempit
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Semester
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
79,46	83,26	84,3	91,34	85

4.14. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)			
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)
4	Deskripsi	:	Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdiri dari penilaian komponen : 1. Komponen Manajemen Perubahan 2. Komponen Penguatan Tata Laksana 3. Komponen Penataan Sistem Manajemen SDM 4. Komponen Penguatan Akuntabilitas 5. Komponen Penguatan Pengawasan 6. Komponen Peningkatan kualitas layanan publik dan 7. Komponen penilaian persepsi anti korupsi yang diperoleh dari pengisian kuesioner oleh stakeholder terhadap pelayanan yang dilaksanakan.
5	Formulasi Perhitungan	:	Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (Inspektorat V) yang ditetapkan dalam SK Menteri KP dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri KP. Capaian IKU Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP di hitung dari rata-rata nilai hasil penilaian TPI terhadap Unit Kerja lingkup DJPB yang diusulkan untuk memperoleh predikat menuju WBK, sebagaimana rumus berikut: $\boldsymbol{NR = \frac{N1+N2+\ldots+Nn}{n}}$ Keterangan: NR = Nilai Rata-Rata Hasil Panel $N_1, N_2, \ldots, Nn$ = Nilai WBK unit kerja n = Jumlah unit kerja
6	Satuan Pengukuran	:	Indeks Nilai
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas Mutu
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP dengan mekanisme berdasarkan pada Permen PAN & RB dan TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Hasil perhitungan raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Kontribusi
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan

16	Tabel Data	:	

Target 2020	Target 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
76	76	1 (Unit)	79,78	76

4.15.	**Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BPBL Ambon (Persen)
4	Deskripsi	:	Persentase tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan eksternal BPK meliputi Sistem Akuntansi Pemerintah adalah Sistem pelaporan Pemerintah yang terintegrasi antara Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan untuk : (i) Menjaga asset Pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; (ii) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja; (IV) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah secara keseluruhan; dan (iv) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
5	Formulasi Perhitungan	:	Persentase (%) = $\frac{\text{Jumlah temuan yang diselesaikan}}{\text{Total Temuan LHP BPK}} \times 100\%$ Keterangan : • % penyelesaian = persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup satker BPBL Ambon • Temuan yang diselesaikan = Jumlah temuan satker BPBL Ambon yang diselesaikan • Total temuan LHP BPK = Jumlah temuan atas realisasi anggaran satker BPBL Ambon yang tercantum dalam LHP BPK Catatan : Jika tidak ada temuan maka capaian atas indikator kinerja ini adalah sama dengan target sehingga presentase capaian atas target adalah 100%
6	Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	Data didapat dari hasil lembar kerja evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan, TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru

14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
100	100	100	100	100

4.16. Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)			
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)
4	Deskripsi	:	Penilaian Kementerian PAN & RB atas akuntabilitas kinerja KKP. Akuntabilias kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian Rekon SAKIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon secara berkala dilakukan oleh Tim Kinerja Biro Perencanaan dan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dengan menggunakan lembar evaluasi tertentu dengan cara perhitungan dan bobot tertentu untuk setiap pemenuhan dokumen yang dilaksanakan. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).
5	Formulasi Perhitungan	:	Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB Kategori Nilai SAKIP adalah sebagai berikut :

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
A	>80 – 90	Memuaskan
BB	>70 – 80	Sangat Baik
B	>60 – 70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30 – 50	Kurang
D	0 – 30	Sangat Kurang

6	Satuan Pengukuran	:	Nilai
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas Mutu
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi

9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Hasil perhitungan raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
84,59	96,74	97,07	72,95	82

4.17.	**Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BPBL Ambon (Persen)
4	Deskripsi	:	Persentase tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan internal Itjen KKP meliputi Sistem Akuntansi Pemerintah adalah Sistem pelaporan Pemerintah yang terintegrasi antara Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara. Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan untuk : (i) Menjaga asset Pemerintah dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemprosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum; (ii) Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja; (IV) Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan pemerintah secara keseluruhan; dan (iv) Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.
5	Formulasi Perhitungan	:	Persentase (%) = $\frac{\text{Jumlah rekomendasi itjen yang telah tuntas}}{\text{Jumlah rekomendasi itjen yang diterima}} \times 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru

14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Triwulan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
100	100	90,91	100	100

4.18.	**Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)
4	Deskripsi	:	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah gambaran tingkat keberhasilan satuan kerja di dalam kegiatan pelaksanaan anggaran. Untuk mengukur tingkat indeks kinerja pelaksanaan anggaran IKPA dalam pengelolaan dana APBN yang terdiri dari : 1. Aspek kesesuaian dengan perencanaan • Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) • Halaman III DIPA • Pagu minus 2. Aspek kepatuhan terhadap regulasi • Pengelolaan uang persediaan • Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban bendahara • Data Kontrak • Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) 3. Aspek efektifitas pelaksanaan kegiatan • Penyelesaian tagihan • Penyerapan anggaran • Retur Surat Perintah Pencairan Dana 4. Aspek efisiensi pelaksanaan kegiatan • Perencanaan Kas • Pengembalian Surat Perintah Membayar (SPM)
5	Formulasi Perhitungan	:	

DEFINISI

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain
a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95;
b. Baik, apabila 89 ≤ nilai IKPA > 95;
c. Cukup, apabila 70 ≤ nilai IKPA < 89; atau
d. Kurang, apabila nilai IKPA >70

CARA PERHITUNGAN

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

✓ Konversi bobot bernilai 100% apa bila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
✓ Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Nilai IKPA =

$$\sum_{n=1}^{8} (Nilai\ Indikator_{n}\ x\ Bobor\ Indikator_{n}) : Konversi\ Bobot$$

1. Revisi DIPA – Bobot Penilaian 10%
✓ Indikator revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan satker dalam satu triwulan dimana frekuensi revisi 1 kali dalam satu triwulan (tidak kumulatif)
✓ Revisi kewenangan IKPA, revisi refocusing yang menjadi kebijakan pemerintah dikecualikan dalam perhitungan
✓ Semakin rendah frekuensi revisi DIPA, maka capaian indikator revisi DIPA semakin baik

IKPA Rev = $IKPA\ Rev = \frac{\sum_{i=1}^{n} RRev\ n}{n}$

2. Devisiasi RDP (Halaman III DIPA) – Bobot Penilaian 10%
✓ Indikator Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RDP) per jenis belanja setiap bulan
✓ Nilai RDP dikunci setiap awal triwulan dengan batas pemutakhiran RPD sampai dengan 10 hari kerja pertama setiap triwulan khusus triwulan 1 batas akhir pemutakhiran 10 hari kerja bulan Februari
✓ Semakin rendah deviasi antara realisasi dengan RPD, maka nilai capaian indikator deviasi halaman III DIPA Semakin baik

Belanja Pegawai

$$\text{DevDIPA BPeg} = \frac{||R\ BPeg\ n - RPD\ BPeg\ n||}{RPD\ B\ Peg\ n} x100$$

Belanja Barang

$$\text{DevDIPA BBar} = \frac{||R\ BBar\ n - RPD\ BBar\ n||}{RPD\ B\ Bar\ n} x100$$

Belanja Modal

$$\text{DevDIPA BMod} = \frac{||R\ BMod\ n - RPD\ BMod\ n||}{RPD\ B\ Mod\ n} x100$$

Seluruh Jenis Belanja

$$\text{DevDIPA } n = \frac{||Dev\ DIPA\ BPeg + Dev DIPA\ BBar + Dev\ DIPA\ BMod||}{3}$$

Target Triwulan dihitung dengan

$$TA_n = TPBPeg + TPBBar + TPBMod$$

Target per Jenis Belanja dihitung dengan

$$TPBelPeg_n = Pagu\ BPeg\ x\ Target\ BPeg\ Tw\ ke - n$$
$$TPBelBar_n = Pagu\ BBar\ x\ Target\ BBar\ Tw\ ke - n$$
$$TPBelMod_n = Pagu\ BMod\ x\ Target\ BMod\ Tw\ ke - n$$

Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran Triwulanan

$$NKPA_n = \frac{(PAn)}{(TPn)} x\ 100$$

3. Penyerapan Anggaran– Bobot Penilaian 20%
   - ✓ Indikator penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan
   - ✓ Nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran pada setiap triwulan
   - ✓ Semakin tinggi penyerapan anggaran dan melampaui target, semakin baik
   - ✓ Target Penyerapan masing-masing belanja

Jenis Belanja	Target Triwulan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Bel Pegawai	20%	50%	75%	95%
Bel Barang	15%	50%	70%	90%
Bel Modal	10%	40%	70%	90%

4. Belanja Kontraktual – Bobot Penilaian 10%
   - ✓ Indikator Belanja Kontraktual dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Ketepatan Waktu (40%), (2) Komponen Akselerasi Kontrak Dini (30%), dan (3) Komponen Akselerasi Belanja Modal (30%)
   - ✓ Ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin ketepatan waktu penyampaian data kontrak dengan jumlah kontrak yang didaftarkan ke KPPN. Ketepatan waktu pendaftaran kontrak yaitu 5 hari sejak tanda tangan kontrak
   - ✓ Akselerasi kontrak dihitung berdasarkan kontrak dini (penandatangan kontrak sebelum 1 Januari). Kontrak dini mendapat nilai 120 dan kontrak di tahun berjalan mendapat nilai 100
   - ✓ Akselerasi belanja modal dihitung dari penyelesaian pembayaran untuk kontrak belanja modal dengan pagu Rp50 – 200 juta Triwulan I mendapat poin 100, triwulan II 90, triwulan III 80, triwulan IV 70.

KPA BK = $(NK - Kw * 40\%) + (NK\ Dini * 30\%) + (NK\ BM * 30\%)$

5. Penyelesaian Tagihan – Bobot Penilaian 10%
   - ✓ Indikator penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual non belanja pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS kontaktual non belanja pegawai
   - ✓ 17 hari kerja dihitung dari tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS kontaktual
   - ✓ Semakin tepat waktu dalam penyelesaian tagihan, maka capaian indikator penyelesaian tagihan semakin baik

$$RKPT = \left(\frac{SPM\ LS\ TW}{SPM\ LS}\right) x\ 100$$

%GUP disebulankan = % GUP x (jml hari sebulan)/Δt GUP

$$NK - PGUP = \frac{\sum_{i=1}^{n} PGUP}{nGUP}$$

   - ✓ Komponen setoran TUP dihitung berdasarkan rasio setoran TUP terhadap nominal TUP yang dikekola Satuan kerja dalam satu tahun anggaran

$$NKSetor = 100 - \frac{Setoran\ TUP}{TUP} x\ 100$$

   - ✓ Nilai Indikator Pengelolaan UP dan TUP

IKPAUPTUP = (NK – UPKW * 50%) + (NK – PGUP * 25%) + (NKSetor * 25%)

6. Pengelolaan UP dan TUP – Bobot Penilaian 10%
   - ✓ Indikator Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP Tunai dan TUP Tunai yang sumber dananya dari Rupiah Murni
   - ✓ Nilai indikator pengelolaan UP dan TUP dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen Ketepatan Waktu (50%), (2) Komponen Persentase GUP (25%), dan (3) Komponen Setoran TUP (25%)
   - ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari frekuensi ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP yaitu paling lambat 1 bulan sejak SP2D terbit

$$NK - UPKW = \frac{\sum_{i=1}^{n} KWUP}{nGUP + nPTUP}$$

   - ✓ Komponen persentase GUP dihitung berdasarkan rata-rata nilai persentase GUP disebulankan terhadap jumlah GUP yang disampaikan ke KPPN.

7. Dispensasi SPM – Bobot Penilaian 5%
   - ✓ Dispensasi SPM dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan IV.
   - ✓ Nilai IKPA diberikan secara berjenjang sesuai dengan kategori rasio Dispensasi SPM sebagaimana berikut:

Kategori Nilai	Nilai	Dispensasi SPM yang terbit (Permil)*
Kategori 1	100	0,00 (tidak ada dispensasi SPM)
Kategori 2	95	0,01 – 0,099
Kategori 3	92	0,1 – 0,99
Kategori 4	85	1 – 4,99
Kategori 5	82	>= 5,00

   - ✓ Rasio Dispensasi (permil)

$$RDSPM = \left(\frac{SPM\ Dispensasi}{SPM\ Tw\ UV}\right) x\ 1000$$

8. Capaian Output – Bobot Penilaian 25%
   - ✓ Capaian Output (CO) dihitung berdasarkan nilai komposit antara Nilai Kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (30%), dan (2) komponen Capaian RO (70%)
   - ✓ Komponen ketepatan waktu dihitung dari jumlah poin yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan capaian output paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya

$$NK\ ROKW = \frac{\sum_{i=1}^{n} ROKW}{n}$$

   - ✓ Komponen capaian RO dihitung berdasarkan rasio antara capaian atau realisasi RO terhadap target capaian RO. Target capaian RO triwulan I sampai dengan triwulan III berdasarkan target PCRO sama dengan target penyerapan anggaran, sedangkan target triwulan IV sama dengan target RO pada DIPA
   - ✓ RO yang dihitung nilai kinerjanya adalah RO yang Terkonfirmasi

$$NK - CRO = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} Capaian\ RO}{\frac{Target\ RO}{n}}\right)$$

   - ✓ Nilai Indikator Capaian Output

$$IKPA - CRO = (NK - ROKW\ x\ 30\%) + (NKCRO\ x\ 70\%)$$

6	Satuan Pengukuran	:	Nilai
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Semester

16 Tabel Data :

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
86,44	92,73	98,34	93,30	93,76

4.19.	**Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Nilai Kinerja Anggaran Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)
4	Deskripsi	:	Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L: $NK = (P\text{x}W_p) + (K\text{x}W_K) + (PK\text{x}W_{PK}) + (E\text{x}W_E)$ Nilai Kinerja aspek implementasi = **P** : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker (Bobot Penyerapan Anggaran (WP) =9,7%) **K** : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK)=18,2%) **PK** : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) =43,5%) **E** : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) =28,6%)
5	Formulasi Perhitungan		*Formula Aspek Implementasi* $NKI = (P \text{ x } W_p) + (K \text{ x } W_k) + (COP \text{ x } W_{COP})$ atau $CRO \text{ x } W_{CRO}) + (NE \text{ x } W_E)$ Keterangan : NKI : nilai kinerja atas aspek implementasi P : penyerapan anggaran K : konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan COP : capaian output program CRO : capaian ro NE : nilai efisiensi unit eselon I atau satuan kerja W_P : bobot penyerapan anggaran W_K : bobot konsistensipenyerapan anggaran terhadap perencanaan W_{COP} : bobot capaian Output Program W_{CRO} : bobot capaian RO *Formulasi Aspek Manfaat* $NKA\ K/L = \frac{\text{CSS} + \text{ rata} - \text{rata nilai kinerja anggaran tingkat unit essel}}{2}$

			Keterangan : NKA K/L : nilai kinerja anggaran tingkat kementerian/ lembaga CSS : capaian sasaran strategis/ nilai kinerja kementrian/ lembaga atas aspek manfaat W_E : bobot efisiensi Bobot masing masing variabel aspek implementasi sebagai berikut : W_P = 9,7% W_K = 18,2% W_{COP} = W_{CRO} = 43,5 % W_E = 28,6%
6	Satuan Pengukuran	:	Nilai
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Lingkup Dipersempit
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Semester
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
26,20	85,02	87,34	88,38	86

4.20.	**Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Persen)
4	Deskripsi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang dan jasa lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengacu pada data inputan pada aplikasi SIRUP. Dengan Formula Perhitungan : Tingkat kepatuhan PBJ BPBL Ambon diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : • Rencana umum pengadaan telah dioplod dalam aplikasi SIRUP (20%) • Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%) • Laporan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa (20%) • Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

5	Formulasi Perhitungan	:	Tingkat kepatuhan PBJ BPBL Ambon diukur sebagai berikut : 1) Manajemen Risiko PBJ Strategis (5%) 2) Aktivitas Pengendalian telah dilaksanakan sesuai Manajemen Risiko yang disusun (5%) 3) Paket pengadaan melalui penyedia yang telah diumumkan dalam SIRUP (5%) 4) Ketersediaan KAK, HPS, Spesifikasi Teknis dan Rancangan Kontrak pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian (5%) 5) HPS pada paket pengadaan dengan kontrak berbentuk Surat Perjanjian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan (5%) 6) Pemilihan penyedia barang/Jasa untuk pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang dilaksanakan melalui SPSE (10%) 7) Jumlah pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian yang telah dikontrakkan (Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa) (11,25%) 8) Kesesuaian waktu penyelesaian pengadaan barang/jasa dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%) 9) Kesesuaian kuantitas (jumlah/volume) pengadaan dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%) 10) Kesesuaian spesifikasi pengadaan BARANG dengan kontrak berbentuk surat perjanjian (11,25%) 11) Ketersediaan Laporan Penyelenggaraan PBJ (5%) 12) Hasil pengawasan Inspektorat Mitra terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa ditindaklanjuti oleh Unit yang bersangkutan (15%) 13) Persentase besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa (TKDN)
6	Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	74,50	76,65	82,23	80

4.21.	**Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (%)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

3	Nama IKU	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (%)
4	Deskripsi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Formula Perhitungan : Tingkat kepatuhan BMN BPBL Ambon diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : • Tingkat Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2022 (5%) • Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan Belanja Modal hingga triwulan IV tahun 2022 baik ke pengguna barang maupun pengelola barang (10%) • Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi asset) tahun 2022 (10%) • Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 didukung BAST atau Berita Acara Pemakaian (10%) • Penyusunan Laporan BMN dilakukan secara tepat waktu (5%)
5	Formulasi Perhitungan	:	Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6	Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	81,5	76	77,9	80

4.22.	**Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (%)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Wilayah Kerja Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (%)

4	Deskripsi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor perikanan budidaya lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Formula Perhitungan : Tingkat Rasio jumlah pemberitaan negatif terhadap total pemberitaan tentang sektor perikanan budidaya BPBL Ambon diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : • Melakukan analisa isu public dengan kecendrungan tendensi media negative dibandingkan seluruh pemberitaan perikanan budidaya yang dirilis pada periode tertentu
5	Formulasi Perhitungan	:	$\text{Persentase (\%)} = \frac{\text{Jumlah pemberitaan netral dan positif}}{\text{Total Pemberitaan Sektor Perikanan Budidaya}} \times 100\%$
6	Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Rata Rata
13	Metode Cascading	:	Lingkup Dipersempit
14	Polarisasi	:	*Maximaze*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	0	0	100	86

4.23.	**Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Nilai Pengawasan Kearsipan Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon (Nilai)
4	Deskripsi	:	Suatu ukuran yang menggambarkan Nilai Pengelolaan Kearsipan (Arsip dinamis) lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan Formula Perhitungan : Tingkat Nilai Pengelolaan Arsip Dinamis BPBL Ambon diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut : • Penginputan data arsip masuk dan keluar • Identifikasi jumlah arsip yang terdata di BPBL Ambon

5	Formulasi Perhitungan	:	Nilai Pengawasan Kearsipan = ∑ ((Jumlah Nilai Akhir PAD x Bobot) + (Jumlah Nilai Akhir SDK x Bobot))
6	Satuan Pengukuran	:	Nilai
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	84,47	93,27	85,03	

4.24.	**Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)**		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Indeks Pengelolaan Kepegawaian (Indeks)
4	Deskripsi	:	• Pengelolaan pegawai adalah proses pengelolaan pegawai mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi pegawai lingkup BPBL Lombok. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN. • Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan pegawai, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma). • Pengukuran capaian dilakukan secara tahunan

No	Komponen	Nilai
1	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi	40
2	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahan yang diverifikasi	30
3	Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel	30
Total Nilai		100

- Indikator capaian Indeks :

Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma

Indeks	Predikat
1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 75)
2	Dibawah rata-rata (nilai 76 – 80)
3	Rata-Rata (nilai 81 – 85)
4	Diatas Rata-Rata (nilai 86 – 90)
5	Baik (nilai 91 – 95)
6	Sangat baik (nilai > 95)

5	Formulasi Perhitungan	:	1. Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi $\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_SK_yang_ditetapkan}{Jumlah_berkas_yang_diverifikasi} x100\%)]x40$ 2. Rata-Rata Persentase jumlah dokumen terkait proses ketatausahan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahan yang diverifikasi $\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_dokumen_yang_ditetapkan}{Jumlah_berkas_yang_diverifikasi} x100\%)]x30$ 3. Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel $\sum \% = [\sum (\frac{jumlah_dokumen}{Jumlah_target_dokumen} x100\%)]x30$
6	Satuan Pengukuran	:	Indeks Nilai
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Tinggi
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan

16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	-	-	4	4

4.25.	Persentase pelaku usaha perikanan Budi Daya yang terintegrasi KUSUKA (%)		
1	Perspektif	:	-
2	Sasaran Kegiatan	:	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
3	Nama IKU	:	Persentase pelaku usaha perikanan Budi Daya yang terintegrasi KUSUKA (%)
4	Deskripsi	:	• Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. • Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/updating data pelaku usaha budidaya ikan. • Pendataan KUSUKA dihitung mulai 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, dengan baseline data hasil pendataan terakhir tahun 2022 (31 Desember 2022).
5	Formulasi Perhitungan	:	∑ KUSUKA = (Jumlah Pelaku Usaha budidaya ikan yang terdaftar di database / Total Target) x 100
6	Satuan Pengukuran	:	Persen (%)
7	Jenis Aspek Target	:	Kualitas
8	Tingkat Validasi IKU	:	Output Kendali Rendah
9	Unit/Pihak Penanggung jawab IKU	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
10	Sumber Data	:	TIM KERJA DUKUNGAN MANAJERIAL
11	Status Data	:	Raw data
12	Jenis Perhitungan Data	:	Nilai posisi akhir
13	Metode Cascading	:	Buat Baru
14	Polarisasi	:	*Maximize*
15	Periode Pelaporan	:	Tahunan
16	Tabel Data	:	

Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Target 2024
-	-	-	84,21	80

BAB VI. PENUTUP

Pedoman Umum Pengukuran Indikator Kinerja Utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 ini menyajikan cara-cara yang dilakukan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2024 sehingga dapat diketahui capaian hasil dari kinerja berdasarkan perhitungan yang akurat sehingga diperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi unit kerja yang melakukan pengukuran terhadap indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selain itu, realitas perolehan hasil kinerja pun dapat terukur dengan baik melalui hasil evaluasi terhadap pengukuran yang telah dilakukan. Dengan demikian, maka dapat diambil tindak lanjut berupa kebijakan *stakeholder* terhadap kinerja yang dihasilkan, baik pada saat dimulainya kegiatan, saat berlangsungnya kegiatan, ataupun di akhir kegiatan sehingga diharapkan akan diperoleh hasil kinerja yang lebih baik di periode berikutnya.